

Community Empowerment to Address Poverty and Social Inequality: A Case Study of Malasin Village

Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Studi Kasus di Desa Malasin

Arfriani Maifizar^{1*}, Regi Yuliana Sukma²

^{1,2}Universitas Teuku Umar

¹arfrianiMaifizar@utu.ac.id, ²regiyulianasukma@gmail.com

INFORMATION

Article history:

Received April 18, 2025

Accepted July 25, 2025

Keywords:

Poverty,
Powerlessness,
Programs,
Strategies,

ABSTRACT

In general, poverty is a very complex problem, because it is not only related to the problem of low fulfillment of daily living needs, low people's income but also helplessness from economic, social, cultural and political aspects. Various efforts have been made by the government, both the New Order regime government and the Reformation Era government, to tackle poverty, using various approaches, such as a top down approach and a bottom up approach, as well as formulating various program policies, both social assistance programs and empowerment-based programs. The empowerment program is carried out to fully involve the community, starting from identifying problems, formulating, planning to the implementation and evaluation stages of the program, which aims to improve community welfare.

Corresponding Author:

Arfriani Maifizar

Universitas Teuku Umar

Email: arfrianiMaifizar@utu.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan selalu menarik untuk diperbincangkan. Mulai dari forum- forum diskusi, seminar, *talk show*, dengan tawaran gagasan dari berbagai kalangan, baik para akademisi, pakar, praktisi sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Berbagai teori, konsep dan pendekatan dikembangkan, dirumuskan untuk menyibak tirai misteri kemiskinan. Namun sampai saat ini, persoalan kemiskinan belum terselesaikan secara komprehensif.

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Hal ini bukan saja karena persoalan kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita, namun gejalanya semakin meningkat seiring dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kondisi ini merupakan sebuah persoalan yang mengandung banyak dimensi yang menuntut pecahannya melalui berbagai pendekatan.. Karena itu, setiap upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya menanggulangi masalah kemiskinan itu sendiri. Tetapi yang menjadi fokus adalah bahwa konsep kemiskinan bukan dalam pengertian sempit bahwa problem kemiskinan semata-mata karena faktor ekonomi, melainkan dimensi sosial, budaya, juga politik sebagai sumber kemiskinan.

Kemiskinan dalam berbagai tampilan wajahnya, telah memberikan dampak kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kendati kemiskinan melekat pada individu atau perorangan, namun bukan berarti semata-mata adalah tanggung jawab individu, melainkan harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa atau *stakeholder* untuk mengatasi persoalan besar ini.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah di Rezim Orde Baru maupun pada Era Reformasi untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah mempunyai perhatian besar terhadap masalah ini, faktanya berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun sampai sekarang kemiskinan tetap ada.

Dimensi-dimensi Kemiskinan, kemiskinan tidak hanya mencakup persoalan materi saja, namun juga masalah- masalah non ekonomi. Karena sifatnya yang multidimensi, maka kemiskinan tidak hanya menyangkut kesejahteraan sosial. Adapun definisi kemiskinan dari beberapa dimensi, dikemukakan di bawah ini (Nugroho dalam Sunartiningsih,2004:80) adalah: Kemiskinan berdimensi ekonomi; Kemiskinan Absolut, suatu kondisi di

mana tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok orang masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan Relatif, mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, namun secara relatif pendapatannya masih di bawah rata-rata penduduk sekitarnya.

Kemiskinan berdimensi Sosial-Budaya; Kemiskinan Kultural, suatu kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, fatalistik dan sebagainya. Kemiskinan Berdimensi Struktural atau Politik. Kemiskinan struktural atau Politik, kemiskinan ini muncul sebagai akibat masyarakat miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

Dimensi-dimensi kemiskinan ini, pada hakikatnya sebagai gambaran bahwa sumber awal masalah kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan diasumsikan sebagai sumber masalah utama terjadinya kemiskinan yang kemudian membawa implikasi pada faktor-faktor pendukung kemiskinan yang lain. Ketidakberdayaan pada aspek ekonomi ditandai oleh terbatasnya aset khususnya faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang rendah serta kemampuan yang rendah dalam merespons peluang ekonomi. Ketidakberdayaan ranah politik dapat dilihat dari kecilnya akses dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya posisi tawar dalam membela hak politik sehingga terjadi diskriminasi. Sementara ketidakberdayaan secara sosial ditandai dengan rendahnya akses terhadap informasi dan pelayanan sosial, lemahnya interaksi sosial sehingga masyarakat menjadi termarginalkan. Kemudian ketidakberdayaan kultural ditandai dengan lemahnya daya dukung dan daya dorong nilai kultural terhadap usaha peningkatan kondisi kehidupan.

Berbagai bentuk ketidakberdayaan tersebut, mengakibatkan lapisan masyarakat miskin mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat miskin akan dihindangi rasa malas, apatis, memiliki sikap dependen atau ketergantungan terhadap pemerintah, sehingga masyarakat tidak mempunyai kemandirian untuk melakukan perbaikan hidup yang lebih baik.

Faktor-faktor penyebab kegagalan pengentasan kemiskinan, selama ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, antara lain merumuskan berbagai standar obyektif garis kemiskinan dan pemetaan kantong-kantong kemiskinan. Tetapi hingga sekarang persoalan kemiskinan belum membuahkan hasil yang memuaskan. Menurut Setiadi (Setiadi dan Kolip, 2010:834-835) bahwa pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu, Program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada program bantuan sosial untuk orang miskin. Program tersebut antara lain jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin, pemberian beras miskin serta bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah, tidak akan menyelesaikan persoalan kemiskinan, justru memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin, menjadikan mereka selalu bergantung baik budi pemerintah tanpa harus bekerja keras untuk merubah nasib. Masyarakat akan terkena virus penyakit psikososial yaitu malas bekerja, fatalistik, manja, rasa bergantung terhadap pemerintah cukup tinggi.

Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga program kemiskinan tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil *survey social* dan ekonomi nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran para sejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN. Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya data dan informasi seperti tidak dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai Negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.

Ketidakterhasilan dalam pengentasan kemiskinan, selain disebabkan faktor bantuan sosial yang tidak mendidik masyarakat miskin, juga cara pemahaman yang selalu didasarkan pada pemikiran Neo-Klasik bahwa kemiskinan disebabkan sebuah kondisi ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan politik masyarakat. Akibat dari pandangan itu, proyek pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat lebih berorientasi pada perbaikan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

Mengatasi kemiskinan merupakan upaya memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Masyarakat miskin diberi akses yang luas untuk menjangkau berbagai sumber-sumber daya yang dapat menopang kehidupan mereka. Oleh karena itu, program bantuan seharusnya difokuskan untuk menumbuhkan ekonomi produktif, dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa agunan pada masyarakat miskin, juga memberikan pelatihan keterampilan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kemandirian (Fitriyani & Anggraeni, 2024). Dengan demikian, secara bertahap, masyarakat membebaskan diri dari ketergantungan kepada pemerintah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena pemberdayaan masyarakat secara lebih mendalam (Afandi, Agus Laily, Nabiela Wahyudi, Noor Umam & dkk, 2022), terutama terkait upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial yang terjadi di Desa Malasin. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian tidak hanya berhenti pada angka atau statistik, tetapi juga menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi program pemberdayaan di tingkat lokal.

Sumber data penelitian ini berupa bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pembangunan desa, serta kebijakan sosial lainnya. Bahan hukum primer tersebut diperoleh dari berbagai dokumen resmi, artikel, jurnal ilmiah, dan literatur relevan yang menjadi dasar pijakan analisis terhadap implementasi kebijakan di tingkat desa.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa buku-buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, dan tulisan ilmiah lain yang memberikan interpretasi, penjelasan, dan konteks teoritis terkait konsep pemberdayaan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi serta memberikan perspektif komparatif dalam menganalisis kasus di Desa Malasin.

Dengan memadukan pendekatan kualitatif serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Malasin dijalankan, faktor pendukung maupun penghambatnya, serta sejauh mana program tersebut efektif dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di tingkat desa.

HASIL DAN DISKUSI

Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Bicara masalah kemiskinan bukan merupakan isu baru, melainkan merupakan isu yang seolah abadi sepanjang jaman. Betapa menggelisahkan pada era yang sudah semakin canggih, kemiskinan masih saja tetap dominan. Kemajuan jaman yang diekspresikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, di satu sisi hanyalah memberikan kontribusi kesejahteraan pada sebagian kecil penduduk dunia, sementara dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia masih terbelenggu kemiskinan dari berbagai lini kehidupan.

Secara Sosiologis sejarah menunjukkan bahwa pembangunan di Era Orde Baru, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan aspek-aspek sosial, budaya dan politik. Pada akhirnya berdampak pada tidak merata hasil-hasil pembangunan, sehingga menimbulkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. Kita tidak menafikan, pemerintah di rezim Orde Baru melaksanakan berbagai program pembangunan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, seperti program jaringan pengamanan sosial (JPS) meliputi: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Tabungan kesejahteraan Keluarga (Takesra), serta Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra).

Orientasi sasaran IDT, Takesra Kukesra adalah masyarakat miskin di Indonesia. Meskipun sasaran program sama yaitu penduduk miskin, akan tetapi jika dilihat secara khusus terdapat perbedaan wilayah sasaran antara IDT, Takesra dan Kukesra. IDT memiliki sasaran penduduk miskin yang berada di desa-desa tertinggal, sedangkan Takesra dan Kukesra Memiliki sasaran Penduduk miskin yang berada di luar lokasi desa tertinggal (Sulistiyani,2004:8).

berjalan optimal karena program tersebut selain tidak mampu memberikan *outcome* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga pendekatan yang digunakan adalah *top-down* yang segalanya bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai obyek pembangunan saja.

Pendekatan *top-down* dalam pembangunan pada dasarnya bersifat sentralistis, di mana seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan didominasi oleh otoritas pemerintah pusat. Dalam model ini, masyarakat ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), bukan sebagai subjek yang memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan. Robert Chambers (1995) dalam gagasan *Putting the Last First* menyebut pola ini sebagai bentuk "*development from above*" yang sering kali mengabaikan aspirasi, kebutuhan riil, dan kondisi sosial masyarakat akar rumput.

Dalam praktiknya, pendekatan *top-down* menimbulkan ketidakberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk menyampaikan aspirasi maupun melakukan kontrol terhadap berbagai program pembangunan. Paulo Freire (1970) melalui pendekatan pedagogi kritis menegaskan bahwa ketidaklibatan masyarakat akan mematikan daya kritis, inisiatif, dan kreativitas mereka, sehingga menjadikan masyarakat hanya objek yang pasif (Azhari M., 2021)

Selain itu, pendekatan *top-down* sering mengabaikan aspek sosial dan budaya lokal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Scott (1998) dalam *Seeing Like a State* menjelaskan bahwa proyek pembangunan yang terlalu teknokratik dan seragam (uniform) cenderung gagal karena tidak memperhitungkan pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan keragaman sosial budaya Masyarakat (Anggraeni, Adzima, & Afiani, 2024).

Hal ini terlihat jelas ketika kebijakan pembangunan tidak disesuaikan dengan kondisi geografis, demografis, serta kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda antar wilayah.

Ketika perbedaan potensi wilayah tidak diakui, pembangunan menjadi bersifat generalis dan tidak kontekstual. Akibatnya, banyak produk pembangunan yang tidak tepat sasaran, tidak digunakan oleh masyarakat, atau bahkan tidak memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Ini sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh James M. Buchanan (1999) dalam teori pilihan publik, bahwa kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan kelompok yang terdampak akan selalu menghasilkan *policy failure* (Hudson, Hunter, & Peckham, 2019).

Pada akhirnya, pendekatan *top-down* berpotensi menimbulkan pembangunan yang tidak efektif, mubazir, dan tidak berkelanjutan. Ravallion (2016) mencatat bahwa pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal cenderung tidak mampu menjawab akar persoalan kemiskinan atau kesenjangan sosial. Program-program pembangunan menjadi sekadar proyek administratif tanpa memperhatikan asas manfaat dan keberlanjutan bagi masyarakat.

Karena itu, kritik terhadap pendekatan sentralistik mendorong lahirnya paradigma pembangunan baru yang menekankan partisipasi masyarakat (*community-based development*). World Bank (2001) menyebut bahwa inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal adalah kunci keberhasilan pembangunan yang responsif dan berkelanjutan. Pergeseran ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang baik harus mengutamakan kebutuhan riil masyarakat, menghargai keragaman lokal, serta membuka ruang dialog antara negara dan warga.

Belajar dari pengalaman program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan pada zaman Orde Baru, pemerintah di rezim Reformasi, merumuskan berbagai kebijakan program bantuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti bantuan beras miskin, bantuan langsung tunai, pemberian bantuan kesehatan jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas), bantuan dana operasional sekolah (Bos) dengan beasiswa untuk orang miskin, bantuan bibit dan pupuk gratis untuk masyarakat petani, program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), program pengembangan kecamatan (PPK) dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.

Dalam pelaksanaan program-program tersebut di atas, pemerintah menggunakan pendekatan *bottom-up* yaitu pendekatan yang dianggap cukup ideal dalam pembangunan dengan memperhatikan inisiatif, kreativitas, aspirasi masyarakat dan memosisikan masyarakat sebagai subyek atau aktor pembangunan. Dengan demikian, peningkatan taraf hidup masyarakat miskin harus berorientasi pemberdayaan.

Secara konseptual, menurut (Suharto, 2005:58) bahwa pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*, berasal dari kata 'Power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin

(Nugroho, 2001:195-197) yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menekan perasaan ketidakberdayaan (*impotensi*) masyarakat miskin bika berhadapan dengan struktur sosial dan politik.
2. Setelah kesadaran kritis muncul, upaya memutus hubungan eksploitasi terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan.
3. Tanamkan rasa kesamaan (*egalitarian*) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial.
4. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh.
5. Perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin.
6. Redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata.

Program-program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah pada era Reformasi dalam rangka pengentasan kemiskinan memang menunjukkan capaian tertentu, terutama jika dilihat dari penurunan angka kemiskinan secara statistik. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan pada aspek kuantitatif, misalnya melalui peningkatan akses bantuan sosial, perluasan layanan dasar, dan berbagai intervensi ekonomi untuk kelompok rentan. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat miskin, sehingga hasilnya dinilai belum cukup signifikan apabila ditinjau dari dimensi yang lebih luas.

Secara kuantitas, pemerintah berhasil menekan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu. Akan tetapi, dari sisi kualitas, kemiskinan masih tampak sebagai persoalan yang bersifat struktural dan multidimensi. Masyarakat masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang ditandai oleh rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan keterampilan kerja, akses ekonomi yang sempit, serta minimnya jaringan sosial dan dukungan yang

mampu mendorong mobilitas sosial. Di banyak wilayah, kemiskinan juga melekat pada faktor budaya dan sosial tertentu, seperti ketergantungan terhadap bantuan, lemahnya daya tawar masyarakat terhadap struktur ekonomi lokal, hingga terbatasnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Selain itu, aspek politik turut berpengaruh terhadap keberlanjutan kemiskinan. Kemiskinan kerap berkaitan dengan lemahnya akses terhadap sumber daya, informasi, dan representasi yang adil. Ketika masyarakat miskin tidak memiliki posisi yang kuat dalam arena politik dan kebijakan publik, berbagai program yang dibuat berisiko tidak tepat sasaran, tidak responsif terhadap kebutuhan nyata, atau berhenti sebatas rutinitas administratif. Dalam situasi seperti ini, program pemberdayaan dapat menjadi bersifat “karitatif” semata membantu untuk bertahan, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong kemandirian dan perubahan sosial-ekonomi jangka Panjang (Muhammad Nurul Huda & Amsar A. Dulmanan, 2024).

Karena itu, penanggulangan kemiskinan perlu dipahami sebagai proses panjang yang membutuhkan pendekatan terpadu dan berkelanjutan. Kemiskinan tidak cukup ditangani hanya dengan bantuan sementara atau program sektoral yang berdiri sendiri, melainkan harus ditopang oleh integrasi kebijakan lintas bidang—pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, infrastruktur, hingga penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Pendekatan ini juga harus memastikan adanya kesinambungan program, penguatan kapasitas penerima manfaat, dan mekanisme evaluasi yang tidak hanya mengukur *output*, tetapi juga dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Lebih jauh, keberhasilan program pengentasan kemiskinan menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara berjenjang dan kolaboratif, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan level paling bawah, serta melibatkan komunitas, lembaga sosial, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat itu sendiri sebagai subjek pemberdayaan. Dengan koordinasi yang kuat, pembagian peran yang jelas, dan komitmen yang konsisten, program-program pengentasan kemiskinan tidak hanya akan menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga mendorong transformasi sosial, budaya, dan politik yang memungkinkan masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan dan bermartabat.

KESIMPULAN

Eskalasi konteks kontemporer HAM menempatkan Organisasi Masyarakat Sipil sebagai agen penting untuk misi penegakan HAM. Pergeseran konteks tersebut diikuti dengan semakin besarnya kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ditolak oleh manusia, tetapi kenyataannya sulit untuk dihindarkan. Berdasarkan pengalaman yang terjadi bahwa selama ini bangsa Indonesia belum pernah terbebas dari kemiskinan.

Pemerintahan di Era Orde Baru cenderung menggunakan pendekatan *top-down* dalam melaksanakan program pembangunan. Masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan, sehingga mematikan segala potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat, pada akhirnya kesenjangan semakin lebar antara masyarakat kaya dan miskin. Sementara pemerintahan pada rezim Reformasi, belajar dari pengalaman sejarah, dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah senantiasa bertumpu pada pendekatan *bottom-up*, di mana masyarakat diposisikan sebagai subyek atau aktor pembangunan, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan dalam pengentasan kemiskinan selama ini, karena adanya pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan itu sendiri. Penyebab kemiskinan adalah semata-mata faktor ekonomi, sehingga cenderung program yang ditawarkan untuk memperbaiki peningkatan pendapatan masyarakat, dengan mengabaikan aspek-aspek lain seperti aspek sosial, budaya dan politik yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat miskin.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi strategi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

REFERENSI

- Afandi, Agus Laily, Nabiela Wahyudi, Noor Umam, H. M., & dkk. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. (J. Suwendi Basir, Abd Wahyudi, Ed.) (Vol. 2).
- Anggraeni, D., Adzima, F., & Afiani, Z. (2024). Eksistensi Lopis Raksasa sebagai Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Pekalongan. *Motivation Science*, 10(2), 143–154. <https://doi.org/10.47776/moza>
- Azhari M., A. N. (2021). Pendidikan Humanis (Studi Komparasi Pemikiran Paulo Freire Dan Abdurrahman Masud). *Dirasab: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam*, 4(2), 173–192. Retrieved from <https://stai-binamadani.e-journal.id/jurdir>

- Fitriyani, F., & Anggraeni, D. (2024). Optimalisasi Ketahanan Pangan Desa Rowolaku Melalui Pemberdayaan Tim Penggerak PKK dalam Program Kebun Gizi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 2808–2817. Retrieved from <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmmba/article/view/1338>
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Muhammad Nurul Huda, & Amsar A. Dulmanan. (2024). Embodied Engagement, Context, and Objectivity: Science as a Human Social Practice. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 5(2 SE-Articles), 139–165. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.005.02.08>
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi, Elly M., and Usma Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sunartiningih, Agnes, ed. 2004. *Memberdayakan Masyarakat Desa melalui Institusi Lokal*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sukmana, Oman. 2005. *Sosiologi dan Politik Ekonomi*. Malang: UMM Press.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.